

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran merupakan suatu komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang pelaksanaannya diserahkan kepada kementerian atau lembaga dan satuan kerja untuk kepentingan masyarakat (Handayani, Sinarwati, & Rahmawati, 2022). Setiap tahun, pemerintah pasti akan mengalokasikan dana untuk berbagai program kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guna kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pembangunan secara keseluruhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. APBD terdiri dari 2 komponen utama yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan keuangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti pajak, pnbp, serta sumber lainnya. Sedangkan belanja daerah merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan atau program pembangunan serta operasional pemerintah daerah.

Proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi dasar dalam pelaksanaan penyusunan anggaran dan otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah serta memberikan bantuan dana untuk menjalankan kewenangan tersebut. Selain itu, penerapan undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah yang lebih baik. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemerintah harus dapat mengelola anggaran dengan baik. Selama ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, salah satunya penyerapan anggaran yang kurang optimal. Penyerapan anggaran cenderung

rendah di awal tahun bahkan hingga pertengahan tahun dan akan meningkat diakhir tahun. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran.

Fenomena rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun hingga pertengahan tahun ini juga terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember. Seperti yang diketahui, Pemkab Jember menargetkan anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 3,9 Triliun. Hingga Oktober 2023 tercapai Rp. 3,2 Triliun atau persentasenya sebesar 81,69%. Sedangkan untuk anggaran belanja, Pemkab Jember menargetkan Rp. 4,1 Triliun, ternyata serapan anggaran hingga Oktober 2023 mencapai Rp. 2,6 Triliun atau persentasenya sebesar 64,48%. Dengan demikian, dapat dipastikan akan ada kerja keras dengan anggaran yang menumpuk di dua bulan terakhir tersebut. Adapun data realisasi anggaran dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel 1. 1 Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 201-2023

| Tahun | Anggaran   | Realisasi  | Tingkat Realisasi |
|-------|------------|------------|-------------------|
| 2019  | 3.671,79 M | 3.815,93 M | 103,93%           |
| 2020  | 3.960,91 M | 3.531,44 M | 89,16%            |
| 2021  | 3.708,36 M | 3.565,33 M | 96,14%            |
| 2022  | 3.811,39 M | 3.715,16 M | 97,48%            |
| 2023  | 3.923,05 M | 3.164,95 M | 80%               |

Sumber: Portal APBD Kemenkeu

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 103,93% dan menurun di tahun 2020 sebesar 89,16%. Sedangkan di tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 96,14% dan 97,48%. Dan mengalami penurunan kembali di tahun 2023 dengan tingkat realisasi 80%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat realisasi pendapatan Kabupaten Jember belum optimal.

Tabel 1. 2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2019-2023

| Tahun | Anggaran   | Realisasi  | Tingkat Realisasi |
|-------|------------|------------|-------------------|
| 2019  | 4.023,38 M | 3.876,91 M | 96,36%            |
| 2020  | 4.532,28 M | 3.297,61 M | 72,76%            |
| 2021  | 4.448,91 M | 3.731,63 M | 83,88%            |
| 2022  | 4.397,87 M | 4.163,36 M | 84,18%            |
| 2023  | 4.222,51 M | 3.426,95 M | 81,16%            |

Sumber: Portal APBD Kemenkeu

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 96,36% dan menurun di tahun 2020 sebesar 72,76%. Sedangkan di tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 83,88% dan 84,18%. Dan mengalami penurunan kembali di tahun 2023 dengan tingkat realisasi 81,16%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat realisasi anggaran belanja Kabupaten Jember belum optimal. Berdasarkan PMK Nomor 258/PMK.02/2015 menetapkan bahwa sasaran penyerapan suatu anggaran dikatakan baik apabila mampu menyerap minimal 95% dari anggaran yang telah ditetapkan. Lambatnya penyerapan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pencatatan administrasi, komitmen organisasi, serta politik anggaran.

Tahap perencanaan anggaran merupakan kunci sukses dalam mengelola keuangan daerah (Putra et al. (2021). Dengan melakukan perencanaan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya yaitu faktor pelaksanaan anggaran juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Nursela et al. (2022). Pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat (Ferdinan, Isnurhadi, Widiyanti, & Adam, 2020). Tahap pelaksanaan anggaran ini

merupakan tahap penting dalam perealisasi dana untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten merujuk kepada individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, Putra et al. (2021) menyatakan bahwa apabila setiap OPD sudah mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan uraian tugas yang diberikan, maka ini menjadi salah satu cara agar tercapainya pengelolaan anggaran yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, pencatatan administrasi secara tepat sangat dibutuhkan agar dapat menyajikan informasi yang jelas dan akurat. Dalam penelitian terdahulu, pencatatan administrasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran (Putra, Kennedy, & Zarefar, 2021). Pencatatan administrasi ini membantu dalam pengawasan bahwa dana digunakan secara tepat dan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan oleh badan atau pejabat pemerintah. Akan tetapi, hasil penelitian terdahulu Harahap et al. (2020) juga menyebutkan bahwa pencatatan administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dari anggota organisasi untuk tetap tinggal di organisasi, dan melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memahami dan menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi (Fitriasuri & Yuliani, 2022). Hal tersebut dapat meningkatkan berbagai dampak positif seperti peningkatan produktivitas, loyalitas, motivasi. Sehingga dalam penelitian terdahulu (Fitriasuri & Yuliani, 2022) komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan, dalam penelitian lainnya Laila Yuliani & Lestari (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran selanjutnya yaitu faktor politik anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran (Suhufi et al., 2023). Politik anggaran merupakan penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana

pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang publik didapatkan, dikelola, dan didistribusikan, siapa yang diuntungkan dan dirugikan, peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik (Suhufi et al., 2023). Akan tetapi, dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa politik anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Ramadhani & Setiawan, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al. (2020) dengan menambah variabel komitmen organisasi dan variabel lainnya sesuai dengan saran penelitian Ramadhani & Setiawan (2019). Alasan penambahan variabel komitmen organisasi karena semakin tinggi keterlibatan dan kepatuhan kerja seorang pegawai berarti semakin baik pula dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, untuk variabel lainnya menggunakan variabel politik anggaran karena masih ditemukannya inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu sehingga peneliti merasa perlu menguji ulang variabel tersebut dengan sampel dan periode waktu yang berbeda.

Perbedaan selanjutnya terletak pada penggunaan *grand theory*. Pada penelitian terdahulu Harahap et al. (2020) menggunakan teori keagenan yang menyatakan sebuah kontrak (hubungan) antara *principal* dan *agen*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* yang menyatakan teori stakeholder (teori pemangku kepentingan) memberikan pandangan terhadap penekanan pada pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat atau terpengaruh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti terkait **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pencatatan Administrasi, Komitmen Organisasi, Serta Politik Anggaran Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?
4. Apakah pencatatan administrasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?
6. Apakah politik anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?
7. Apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, pencatatan administrasi, komitmen organisasi, serta politik anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh kompensasi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
4. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh pencatatan administrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
5. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
6. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh politik anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
7. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, pencatatan administrasi, komitmen organisasi, serta politik anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan diantaranya :

1. Bagi Peneliti  
Peneliti diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pengetahuan tentang seberapa pengaruh perencanaan, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, pencatatan administrasi, komitmen organisasi, serta politik anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran.
2. Bagi Instansi  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran atau bahan pendukung dalam peningkatan penyerapan anggaran.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis terkait pengaruh perencanaan, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, pencatatan administrasi, komitmen organisasi, serta politik anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran.